

DEMOKRASI YANG BERBASIS PANCASILA: MENUMBUHKAN KESADARAN KEWARGANEGARAAN MELALUI PARTISIPASI AKTIF

Agnes Monika Simbolon¹, Sri Yunita², Mirandayani Br Tarigan³, Nazwa Syaiba Lubis⁴,
Christin Novriani Sitorus⁵, Dwita Ardana L. Tobing⁶
agnessimbolon2004@gmail.com¹, sr.yunita@unimed.ac.id², tariganmirandayani@gmail.com³,
syaibanazwa18@gmail.com⁴, christinsitorus562@gmail.com⁵, dwitaardanatobing@gmail.com⁶
Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Demokrasi yang berlandaskan Pancasila adalah suatu sistem pemerintahan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, kesadaran kewarganegaraan menjadi aspek krusial yang perlu dikembangkan untuk membentuk masyarakat yang proaktif dan terlibat dalam proses demokrasi. Dengan partisipasi aktif, warga negara tidak hanya memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi juga turut serta dalam pengambilan keputusan, pengawasan kebijakan, dan pembangunan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi metode-metode efektif dalam meningkatkan kesadaran kewarganegaraan di masyarakat, serta menganalisis dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Melalui pendekatan partisipatif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tanggung jawab dan perannya sebagai warga negara, sehingga tercipta suasana demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan, dialog publik, dan keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil merupakan strategi utama dalam meningkatkan partisipasi aktif dan kesadaran kewarganegaraan.

Kata Kunci: Demokrasi, Pancasila, Kewarganegaraan, Partisipasi Aktif.

ABSTRACT

Democracy based on Pancasila is a government system that integrates Pancasila values in the implementation of national and state life. In this case, civic awareness is a crucial aspect that needs to be developed to form a society that is proactive and involved in the democratic process. With active participation, citizens not only have the right to vote, but also participate in decision making, policy monitoring and social development. This research aims to identify effective methods in increasing civic awareness in society, as well as analyzing their impact on the quality of democracy in Indonesia. Through a participatory approach, it is hoped that the public can better understand their responsibilities and roles as citizens, thereby creating a healthy and sustainable democratic atmosphere. Research findings show that civic education, public dialogue, and involvement in civil society organizations are key strategies in increasing active participation and civic awareness.

Keywords: Democracy, Pancasila, Citizenship, Active Participation.

PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia seringkali dimaknai secara sempit sebagai kredo dari, oleh, dan untuk rakyat. Konsekuensinya kredo ini lebih cenderung bersifat memaksa rakyat untuk memahami sistem demokrasi itu sendiri serta rakyatnya tentunya masih banyak yang belum memahami esensi dari demokrasi sehingga cenderung masih memperlihatkan ciri otoriter atau totaliter. Dalam perkembangannya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam persatuannya. Untuk itulah pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Negara

Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa.

Kehidupan yang demokratis dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu diterapkan demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga warga negara yang demokratis. Demokrasi sebuah proses untuk mencapai tujuan peradaban manusia. Demokrasi bukanlah sebuah wacana pola pikir, atau perilaku politik yang dibangun satu kali jadi, namun demokrasi adalah proses dimana masyarakat dan negara berperan di dalamnya untuk membangun kultur dan sistem kehidupan yang dapat menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Demokrasi dapat tercipta apabila masyarakat dan pemerintah bersama membangun kesadaran pentingnya demokrasi.

Dalam era yang penuh tantangan ini, pembangunan demokrasi menjadi suatu hal yang krusial dalam menghadapi berbagai dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Salah satu fondasi utama dalam memperkuat demokrasi adalah melalui pendidikan yang menyeluruh dan inklusif. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran akan nilai-nilai demokrasi, memupuk semangat partisipasi masyarakat, dan membentuk karakter yang inklusif dan menghargai keberagaman. Dalam konteks Indonesia, Pancasila telah menjadi landasan filosofis dan ideologis negara sejak kemerdekaannya. Pancasila bukan hanya sekedar semboyan, melainkan juga sebuah pandangan hidup yang memandu kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pendidikan, peran Pancasila menjadi krusial dalam membangun kesadaran demokrasi di kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis tematik. Penelitian ini akan fokus pada pemahaman mendalam tentang konsep demokrasi berbasis Pancasila, kesadaran kewarganegaraan, dan partisipasi aktif. Data dikumpulkan dari jurnal, buku, dan fakta-fakta yang relevan. Analisis tematik akan digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data literatur, seperti konsep demokrasi berbasis Pancasila, kesadaran kewarganegaraan, bentuk-bentuk partisipasi aktif, dan hubungan antara ketiga konsep tersebut. Metode ini memungkinkan peneliti untuk membangun kerangka teoritis yang kuat, mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian, dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori dan pengetahuan tentang demokrasi, Pancasila, dan partisipasi warga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan adalah kebutuhan sepanjang hidup yang sangat penting bagi setiap individu. Semua orang memerlukan pendidikan untuk berkembang seumur hidup. Oleh karena itu, pendidikan harus diarahkan untuk mencetak manusia yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memiliki karakter, budi pekerti, dan moral yang baik (Nugroho, 2010). Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yang berbudi pekerti luhur, berpengetahuan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kepribadian yang kuat, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara (Nugroho, 2010). Menurut Mulyasa (2005), ada dua prinsip pendidikan yang terkait erat dengan Pancasila: pertama, pendidikan harus mencakup empat pilar yaitu belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar hidup dalam kebersamaan, dan belajar untuk menjadi diri sendiri; kedua, pendidikan

harus bersifat seumur hidup (life long learning). Dalam sistem pendidikan demokratis, pendidikan berfungsi untuk mendidik warga negara dalam kebajikan dan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat sipil. Pendidikan semacam ini merupakan proses panjang yang melibatkan pendidikan formal di sekolah, serta pengaruh keluarga dan lingkungan sosial. Lembaga pendidikan harus mencerminkan upaya mendidik warga negara menuju masyarakat sipil yang mendukung demokrasi dan menghindari unsur-unsur yang dapat menghambat demokrasi (Batawi, J. W., 2013).

Peningkatan kesadaran demokrasi sangat penting untuk membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan sejahtera. Berikut ini adalah tujuan utama dari peningkatan kesadaran demokrasi:

1. Memperkuat Partisipasi Warga Negara:
 - Keterlibatan dalam Pemilihan yang dimana Warga yang sadar demokrasi lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu, baik lokal maupun nasional, yang merupakan dasar demokrasi.
 - Keterlibatan dalam Proses Pengambilan Keputusan yang dimana Warga yang sadar demokrasi terlibat dalam pengambilan keputusan di komunitas mereka, seperti rapat dewan kota atau forum masyarakat.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah
 - Transparansi dan Pertanggungjawaban yang dimana Kesadaran demokrasi mendorong warga untuk menuntut transparansi dalam kebijakan dan pengelolaan anggaran, yang meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
 - Pemantauan dan Evaluasi yang dimana Warga yang memahami demokrasi memantau kinerja pejabat publik dan mengevaluasi efektivitas kebijakan.
3. Mengembangkan Sikap Kritis dan Analitis
 - Pendidikan Kritis yang dimana Kesadaran demokrasi mendorong pendidikan yang menekankan keterampilan berpikir kritis, sehingga warga tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga menganalisis dan mengevaluasinya.
 - Debat dan Diskusi yang dimana Warga yang sadar demokrasi terlibat dalam debat dan diskusi konstruktif, mendengarkan pandangan orang lain dengan hormat.
4. Menghormati Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial
 - Hak Asasi Manusia yang dimana Kesadaran demokrasi meningkatkan pemahaman tentang pentingnya hak asasi manusia, seperti kebebasan berbicara dan hak untuk memilih.
 - Kesetaraan dan Keadilan yang dimana Prinsip kesetaraan dan keadilan sosial dihargai, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial-ekonomi.
5. Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik
 - Menghormati Proses Demokrasi yang dimana Warga yang sadar demokrasi akan menghargai hasil dari proses demokratis, meskipun tidak sesuai dengan keinginan mereka.
 - Mengurangi Konflik yang dimana Kesadaran demokrasi mengurangi konflik, karena masyarakat lebih mengutamakan dialog dan kompromi daripada kekerasan.

Peran Pancasila Sebagai Landasan

Pancasila memiliki peran krusial sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut adalah peran Pancasila dalam berbagai aspek:

1. Landasan Filosofis
 - Pandangan Hidup Bangsa
Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang sudah berkembang dalam budaya Indonesia, mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.
2. Identitas Nasional
 - Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain, serta menjadi dasar untuk menjaga jati diri dan budaya nasional.
3. Landasan Konstitusional
 - Dasar Negara
Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi dasar konstitusional bagi penyelenggaraan negara dan pedoman bagi peraturan perundang-undangan.
 - Sumber Hukum
Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang memastikan peraturan perundang-undangan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
4. Landasan Etis
 - Pedoman Moral
Pancasila memberikan pedoman moral bagi warga negara, seperti kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan, yang membantu membentuk karakter bangsa yang bermoral tinggi.
 - Budi Pekerti
Pancasila mengajarkan pentingnya budi pekerti, seperti saling menghormati dan gotong royong, untuk hidup harmonis dalam masyarakat.
5. Landasan Politik
 - Sistem Demokrasi Pancasila
Pancasila menjadi dasar bagi penerapan demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, serta partisipasi aktif rakyat.
 - Kedaulatan Rakyat
Pancasila menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui pemilu dan partisipasi politik.
6. Landasan Sosial
 - Persatuan dan Kesatuan
Pancasila mengedepankan persatuan Indonesia, mengajarkan pentingnya kerukunan di tengah keberagaman.
 - Keadilan Sosial
Pancasila menekankan keadilan sosial untuk memastikan kesejahteraan merata dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

Partisipasi aktif siswa yang diamati mencakup aspek fisik dan psikis. Aspek fisik terdiri dari lima indikator, yaitu siswa berpartisipasi dalam tugas belajar, bertanya kepada teman atau guru mengenai hal yang belum dipahami, mengikuti diskusi kelompok sesuai arahan guru, serta menyampaikan hasil pemikiran baik secara lisan maupun dalam bentuk penampilan. Sementara itu, aspek psikis melibatkan tiga indikator pengamatan: siswa terlibat dalam pemecahan masalah, mencoba menerapkan konsep yang diberikan, dan mampu menilai kemampuan diri.

Aktivitas guru yang diamati terkait dengan penerapan model pembelajaran jigsaw, yang mencakup tahap pembagian kelompok, membaca, diskusi pakar, laporan kelompok, tes, dan pemberian penghargaan. Sebelum dilakukan tindakan, hasil pengamatan menunjukkan bahwa partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran PKn masih rendah. Pada

kegiatan pembelajaran, guru hanya menggunakan metode ceramah, di mana guru menjelaskan materi dan siswa hanya mendengarkan. Hal ini menyebabkan siswa cenderung pasif dan kurang merasa bertanggung jawab dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Pendidikan Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan konsep yang menggambarkan status seseorang sebagai anggota suatu negara. Dalam perspektif psikologi, kewarganegaraan mencakup aspek keanggotaan sosial, yang melibatkan praktik hukum, partisipasi masyarakat, dan identitas bersama (Keating, 2014: 43). Selain itu, kewarganegaraan juga berhubungan dengan kehidupan interpersonal dan tingkat sosio-politik (Veugelers, 2007: 106). Pendidikan kewarganegaraan menjadi media untuk meningkatkan kesadaran warga negara mengenai demokrasi. Fokus pendidikan ini telah bergeser dari politik yang berfokus pada negara ke politik yang lebih mengutamakan bangsa (Himmelmann, 2013: 4). Cogan dan Derricot (dalam Wahab, 2011) mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai studi yang mendukung perkembangan karakteristik warga negara. Pendidikan ini bertujuan membentuk warga negara dengan berbagai karakteristik tersebut.

Demokrasi memerlukan sikap tanggung jawab dari setiap warga negara, yang memiliki peran aktif dalam kehidupan negara. Pendidikan kewarganegaraan membantu memperkenalkan dan membiasakan warga negara dengan nilai-nilai demokrasi. Menurut Kerr (1999: 6), pendidikan kewarganegaraan berperan dalam mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan juga mendukung partisipasi aktif dalam masyarakat demokratis modern (Kisby, 2009: 50). Mengingat keragaman budaya dan pluralisme, pendidikan kewarganegaraan harus membantu warga negara memahami keberagaman dan menjaga keterikatan pada komunitas budaya serta berpartisipasi secara efektif dalam budaya nasional (Banks, 2011: 246).

Namun, pendidikan kewarganegaraan sering kali dipandang lebih politis daripada akademis, karena kekurangan dalam landasan keilmuannya, yang berpengaruh terhadap sosok keilmuan yang kurang tampak.

a. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk kesadaran warga negara. Sumantri (2001: 279) menyatakan bahwa pendidikan ini bertujuan mendidik warga negara agar menjadi pribadi yang baik, dengan karakter seperti toleransi, setia kepada bangsa, serta mendalami nilai-nilai demokrasi dan Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan juga berfokus pada pembentukan partisipasi aktif warga negara. Veldhuis (1997: 8) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan merangsang partisipasi aktif dalam masyarakat sipil, khususnya dalam pembuatan keputusan politik. Di Eropa, kewarganegaraan diarahkan untuk membangun kewarganegaraan aktif yang sesuai dengan nilai-nilai republik demokrasi liberal (Kennedy & Brunold, 2016: 8).

Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk menyiapkan generasi muda yang baik, dengan identitas dan kebangsaan nasional yang kuat, serta pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang diperlukan untuk menjalankan hak dan kewajiban mereka (Cogan & Derricot, 1998: 5). Di Inggris, pendidikan kewarganegaraan berfokus pada membangun rasa kewarganegaraan yang sama, termasuk identitas nasional (Starkey, 2018: 2). Di tingkat global, pendidikan kewarganegaraan mempromosikan solidaritas nasional dan global di tengah keberagaman (Osler, 2010: 2). Karakteristik warga negara yang baik di Indonesia mencakup kecerdasan, keterampilan, dan kesetiaan kepada bangsa serta negara, dengan perilaku yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Sunarso dkk, 2006: 5; Hakim, 2014: 9). Murdiono (2012: 47) juga menambahkan bahwa pendidikan kewarganegaraan menekankan kecakapan dalam kepedulian sosial.

b. Ruang Lingkup Materi Pendidikan Kewarganegaraan

Materi pendidikan kewarganegaraan mencakup berbagai aspek kehidupan negara, termasuk hak dan kewajiban warga negara, pemerintah dan lembaga negara, sejarah, konstitusi, identitas nasional, sistem hukum, hak politik, prinsip demokrasi, partisipasi warga negara aktif, serta perspektif internasional (Print, 1999: 12). Pendidikan kewarganegaraan membahas semua aspek kehidupan negara untuk membangun partisipasi aktif dalam budaya, sosial, politik, dan ekonomi (Biesta, 2011: 6).

Pendidikan kewarganegaraan menekankan pentingnya moralitas, serta pengetahuan, nilai, keterampilan, dan sikap sebagai warga negara yang aktif, partisipatif, dan mampu berpikir mandiri (Pan, 2017: 5). Kompetensi kewarganegaraan mencakup pengetahuan tentang kewarganegaraan, keterampilan kognitif, keterampilan partisipatif, serta disposisi kewarganegaraan (Patrick & Vontz, 2001: 41). Kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, dan identifikasi diri sebagai warga negara yang baik (Honskins, dalam Print, 2013: 42).

c. Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi berfungsi sebagai wahana untuk menyosialisasikan nilai-nilai demokrasi kepada warga negara. Tujuan pendidikan demokrasi adalah menumbuhkan kesadaran tentang demokrasi, pengetahuan tentang mekanisme demokrasi seperti tanggung jawab, transparansi, dan perdamaian (Yuniarto, 2018: 33). Pendidikan demokrasi juga bertujuan untuk membentuk budaya demokrasi yang ideal dalam masyarakat (Sunarso, 2016: 371). Menurut Sukarno (2015: 54), pendidikan demokrasi adalah proses pembelajaran yang membutuhkan waktu untuk transformasi nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Keberhasilan pendidikan demokrasi bergantung pada keberhasilan transformasi nilai-nilai demokrasi tersebut.

Selain itu, pendidikan demokrasi memberikan fasilitas bagi warga negara untuk memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai demokrasi sesuai dengan peran mereka dalam masyarakat (Winataputra dan Budimansyah, 2007: 210). Pendidikan demokrasi juga mengajarkan warga negara tentang pilar-pilar demokrasi, seperti demokrasi yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, kedaulatan rakyat, rule of law, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, pengadilan yang merdeka, otonomi daerah, kemakmuran, dan keadilan sosial (Sanusi, 1998: 4-12).

KESIMPULAN

Demokrasi yang berlandaskan Pancasila memiliki peranan yang sangat vital dalam meningkatkan kesadaran kewarganegaraan di Indonesia. Pancasila bukan sekadar lambang negara, melainkan merupakan pedoman yang mengintegrasikan nilai-nilai mulia ke dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Melalui pendidikan kewarganegaraan yang efektif, masyarakat diberikan kesempatan untuk memahami dengan baik hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Keterlibatan aktif dalam berbagai proses demokrasi, seperti pemilu dan pengambilan keputusan dalam komunitas, menjadi tolok ukur utama dari tingkat kesadaran kewarganegaraan yang dimiliki oleh masyarakat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pendekatan partisipatif, yang mencakup dialog publik serta keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil, terbukti sangat efektif dalam mendorong partisipasi aktif dari masyarakat.

Selain itu, memahami hak asasi manusia dan prinsip keadilan sosial menjadi sangat penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan politik. Dengan membangun sikap kritis dan analitis di kalangan warga, kita dapat mengurangi risiko terjadinya konflik dan mendorong terjadinya dialog yang konstruktif. Oleh karena itu, penting untuk terus

mendorong upaya peningkatan kesadaran kewarganegaraan melalui pendidikan yang berorientasi pada Pancasila, agar masyarakat tidak hanya memahami konsep demokrasi, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan-tujuan demokratis yang berkelanjutan. Temuan dari penelitian ini menegaskan bahwa setiap elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama membangun kultur demokrasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih peka terhadap isu-isu sosial dan politik, serta lebih bertanggung jawab dalam menjalankan peran mereka sebagai warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir,A., Iskandar,M,A.,Jalal.,Sriwahyuni.,Salemuddin,R,M.(2022). Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Dalam Demokrasi. Jurnal Konferensi Nasional Sosiologi.
- Utama,P,M.(2016). Peningkatan Partisipasi Aktif Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Model Cooperative Learning Tipe Jigsaw. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar 26(5).
- Widiyanto,D., Istiqomah,A.(2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi. Jurnal Pendidikan 23(1),1-10.
- Ziyadi,Y,A ., Maulia,T,S.(2024). Pembangunan Kesadaran Demokrasi Melalui Pendidikan Peran Pancasila Sebagai Landasan. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 3(12).